



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS JEMBER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANISAH ARDIANA**
2. Jabatan : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK**
3. NHK : **734721**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.105.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 177 m2/78 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 815 m2/135 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 485.000.000
3. Tanah Seluas 970 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 909 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
5. Tanah Seluas 2.054 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 117.900.000**

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
2. LAINNYA, DONPENG TRAKTOR SAWAH Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. LAINNYA, DONFENG MESIN COPER JT 4700 DAN DIESEL MERK DONFENG R 185 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 7.900.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 120.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**



E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 26.600.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.369.500.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.369.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.